



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp1.504.840.826.282,00
2.	Belanja Daerah	Rp1.922.859.931.895,43
	Surplus/(Defisit)	Rp(418.019.105.613,43)
3.	Pembiayaan Daerah	
a.	Penerimaan	Rp428.019.105.613,43
b.	Pengeluaran	Rp10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp418.019.105.613,43
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | Rp150.062.458.282,00 |
| b. | Dana Perimbangan | Rp1.080.922.289.000,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp273.856.079.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|----|---|---------------------|
| a. | Pajak Daerah | Rp32.440.000.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah | Rp9.172.578.200,00 |
| c. | Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp11.500.000.000,00 |
| d. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp96.949.880.082,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- | | | |
|----|---|----------------------|
| a. | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp264.691.072.000,00 |
| b. | Dana Alokasi Umum | Rp567.100.300.000,00 |
| c. | Dana Alokasi Khusus | Rp249.130.917.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	Rp36.452.800.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp100.000.000.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp137.403.279.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp1.012.667.017.080,00
 - b. Belanja Langsung Rp910.192.914.815,43
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp737.777.058.010,00
 - b. Belanja Hibah Rp22.336.400.000,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial Rp9.497.500.000,00
 - d. Belanja Bagi Hasil Rp4.161.257.820,00
 - e. Belanja Bantuan Keuangan Rp235.291.869.350,00
 - f. Belanja Tidak Terduga Rp3.602.931.900,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp24.219.505.900,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp573.381.596.771,24
 - c. Belanja Modal Rp312.591.812.144,19

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp428.019.105.613,43
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp10.000.000.000,00
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :
 - a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp 428.019.105.613,43
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :
 - a. Pemberian Pinjaman Daerah Rp10.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya.
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran karena terjadinya kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan pihak ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran BPJS Pemerintah Daerah, biaya yang menunjang pendapatan daerah antara lain untuk pencetakan karcis serta biaya administrasi kegiatan/umum sebagai penunjang program dan kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat, dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Pasal 9

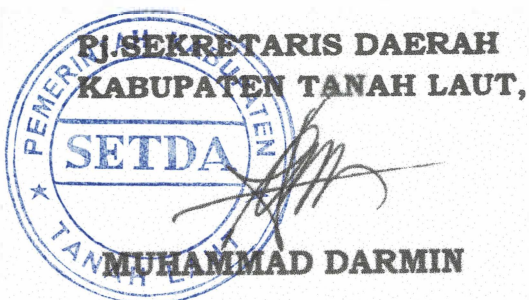
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Desember 2019



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Desember 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (17, 134/2019).




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.504.840.826.282,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.062.458.282,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.440.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.172.578.200,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.949.880.082,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.080.922.289.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	264.691.072.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	567.100.300.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	249.130.917.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	273.856.079.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	36.452.800.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	137.403.279.000,00
2	BELANJA	1.922.859.931.895,43
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.012.667.017.080,00
2.1.1	Belanja Pegawai	737.777.058.010,00
2.1.4	Belanja Hibah	22.336.400.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.497.500.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.161.257.820,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	235.291.869.350,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.602.931.900,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	910.192.914.815,43
2.2.1	Belanja Pegawai	24.219.505.900,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	573.381.596.771,24
2.2.3	Belanja Modal	312.591.812.144,19
	SURPLUS / (DEFISIT)	(418.019.105.613,43)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	428.019.105.613,43
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	428.019.105.613,43
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	418.019.105.613,43
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Batanghari, 27 Desember 2019

BUPATI TANAH LAUT

SUKAMTA


<div><div><div><div>TANAH LAUT</div><div></div></div><div>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</div><div>RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div></div>					
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	72.980.880.082,00	500.996.610.486,00	657.730.685.444,23	1.158.727.295.930,23
1.01	Pendidikan	142.350.000,00	374.714.677.479,00	117.734.709.228,00	492.449.386.707,00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	142.350.000,00	374.714.677.479,00	117.734.709.228,00	492.449.386.707,00
1.02	Kesehatan	72.325.280.082,00	91.386.029.352,00	276.643.673.554,64	368.029.702.906,64
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	72.325.280.082,00	91.386.029.352,00	276.643.673.554,64	368.029.702.906,64
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	388.250.000,00	11.561.455.319,00	209.321.616.878,99	220.883.072.197,99
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	388.250.000,00	11.561.455.319,00	209.321.616.878,99	220.883.072.197,99
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	125.000.000,00	10.589.358.723,00	13.527.253.919,00	24.116.612.642,00
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	125.000.000,00	10.589.358.723,00	13.527.253.919,00	24.116.612.642,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	6.258.657.020,00	10.380.353.585,00	16.639.010.605,00
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	6.258.657.020,00	8.771.897.675,00	15.030.554.695,00
1.05 . 1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	842.009.410,00	842.009.410,00
1.05 . 4.01.05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	733.446.900,00	733.446.900,00
1.05 . 4.01.09	Kecamatan Bati-Bati	0,00	0,00	17.999.800,00	17.999.800,00
1.05 . 4.01.14	Kecamatan Kintap	0,00	0,00	14.999.800,00	14.999.800,00
1.06	Sosial	0,00	6.486.432.593,00	30.123.078.278,60	36.609.510.871,60
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	0,00	4.611.405.935,00	5.611.804.532,00	10.223.210.467,00
1.06 . 1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.875.026.658,00	1.850.248.896,60	3.725.275.554,60
1.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	22.661.024.850,00	22.661.024.850,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	5.165.038.200,00	50.838.537.412,00	94.951.148.987,00	145.789.686.399,00
2.01	Tenaga Kerja	0,00	7.473.247.080,00	5.224.063.072,00	12.697.310.152,00
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	7.473.247.080,00	5.224.063.072,00	12.697.310.152,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	1.184.902.220,00	1.184.902.220,00
2.02 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	1.048.800.000,00	1.048.800.000,00
2.02 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	136.102.220,00	136.102.220,00
2.03	Pangan	138.000.000,00	4.768.851.702,00	3.988.035.972,00	8.756.887.674,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	138.000.000,00	4.768.851.702,00	1.880.659.412,00	6.649.511.114,00
2.03 . 3.03.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	2.107.376.560,00	2.107.376.560,00
2.04	Pertanahan	0,00	0,00	238.434.600,00	238.434.600,00
2.04 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	238.434.600,00	238.434.600,00
2.05	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	29.072.887.860,00	29.072.887.860,00
2.05 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	1.247.570.000,00	1.247.570.000,00
2.05 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	27.825.317.860,00	27.825.317.860,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	3.938.203.108,00	3.938.912.497,00	7.877.115.605,00
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	3.938.203.108,00	3.938.912.497,00	7.877.115.605,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	5.666.451.347,00	8.381.092.756,00	14.047.544.103,00
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	5.666.451.347,00	7.770.641.478,00	13.437.092.825,00
2.07 . 4.01.06	Kecamatan Pelaihari	0,00	0,00	60.954.800,00	60.954.800,00
2.07 . 4.01.07	Kecamatan Tambang Ulang	0,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00
2.07 . 4.01.08	Kecamatan Kurau	0,00	0,00	37.994.300,00	37.994.300,00
2.07 . 4.01.09	Kecamatan Bati-Bati	0,00	0,00	67.430.000,00	67.430.000,00
2.07 . 4.01.10	Kecamatan Batu Ampar	0,00	0,00	47.975.000,00	47.975.000,00
2.07 . 4.01.11	Kecamatan Panyipatan	0,00	0,00	64.803.400,00	64.803.400,00
2.07 . 4.01.12	Kecamatan Takisung	0,00	0,00	70.510.170,00	70.510.170,00
2.07 . 4.01.13	Kecamatan Jorong	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.07 . 4.01.14	Kecamatan Kintap	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07 . 4.01.15	Kecamatan Bajuin	0,00	0,00	38.784.000,00	38.784.000,00
2.07 . 4.01.16	Kecamatan Bumi Makmur	0,00	0,00	53.999.608,00	53.999.608,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.061.197.186,00	8.334.107.996,00	12.395.305.182,00
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	4.061.197.186,00	8.334.107.996,00	12.395.305.182,00
2.09	Perhubungan	926.200.200,00	5.104.988.617,00	6.554.758.910,00	11.659.747.527,00
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	926.200.200,00	5.104.988.617,00	6.554.758.910,00	11.659.747.527,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	491.200.000,00	3.507.904.606,00	9.487.051.353,00	12.994.955.959,00
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	491.200.000,00	3.507.904.606,00	6.883.411.353,00	10.391.315.959,00
2.10 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	2.603.640.000,00	2.603.640.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.300.128.000,00	4.799.470.921,00	4.091.973.292,00	8.891.444.213,00
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	1.300.128.000,00	4.799.470.921,00	4.091.973.292,00	8.891.444.213,00
2.12	Penanaman Modal	1.880.770.000,00	4.652.256.902,00	2.202.385.750,00	6.854.642.652,00
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.880.770.000,00	4.652.256.902,00	2.202.385.750,00	6.854.642.652,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	428.740.000,00	3.236.422.727,00	9.247.051.870,00	12.483.474.597,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.13 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	428.740.000,00	3.236.422.727,00	9.247.051.870,00	12.483.474.597,00
2.16	Kebudayaan	0,00	0,00	1.164.032.500,00	1.164.032.500,00
2.16 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	1.164.032.500,00	1.164.032.500,00
2.17	Perpustakaan	0,00	3.629.543.216,00	1.623.990.118,00	5.253.533.334,00
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.629.543.216,00	1.623.990.118,00	5.253.533.334,00
2.18	Kearsipan	0,00	0,00	217.468.221,00	217.468.221,00
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	217.468.221,00	217.468.221,00
3	Urusan Pilihan	1.018.800.000,00	46.900.223.353,00	37.566.458.663,20	84.466.682.016,20
3.01	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	2.115.047.670,00	2.115.047.670,00
3.01 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	2.115.047.670,00	2.115.047.670,00
3.02	Pariwisata	718.800.000,00	4.182.865.179,00	8.340.323.772,00	12.523.188.951,00
3.02 . 3.02.01	Dinas Pariwisata	718.800.000,00	4.182.865.179,00	8.340.323.772,00	12.523.188.951,00
3.03	Pertanian	300.000.000,00	42.717.358.174,00	21.829.310.133,20	64.546.668.307,20
3.03 . 3.03.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	36.490.813.948,00	15.974.177.794,00	52.464.991.742,00
3.03 . 3.03.02	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	300.000.000,00	6.226.544.226,00	5.855.132.339,20	12.081.676.565,20
3.06	Perdagangan	0,00	0,00	3.245.380.888,00	3.245.380.888,00
3.06 . 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	0,00	0,00	3.245.380.888,00	3.245.380.888,00
3.07	Perindustrian	0,00	0,00	2.036.396.200,00	2.036.396.200,00
3.07 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	0,00	2.036.396.200,00	2.036.396.200,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.425.676.108.000,00	413.931.645.829,00	119.944.621.721,00	533.876.267.550,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	227.740.000,00	86.864.270.093,00	85.906.475.755,00	172.770.745.848,00
4.01 . 4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	22.677.695.120,00	0,00	22.677.695.120,00
4.01 . 4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	686.822.176,00	0,00	686.822.176,00
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	138.256.000,00	18.429.199.011,00	28.968.306.652,00	47.397.505.663,00
4.01 . 4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	4.518.041.990,00	36.437.143.618,00	40.955.185.608,00
4.01 . 4.01.05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.391.074.820,00	2.440.591.680,00	6.831.666.500,00
4.01 . 4.01.06	Kecamatan Pelaihari	19.233.250,00	9.411.672.574,00	7.533.243.979,00	16.944.916.553,00
4.01 . 4.01.07	Kecamatan Tambang Ulang	9.000.000,00	3.016.563.647,00	1.217.080.000,00	4.233.643.647,00
4.01 . 4.01.08	Kecamatan Kurau	5.000.000,00	3.293.260.804,00	897.049.341,00	4.190.310.145,00
4.01 . 4.01.09	Kecamatan Bati-Bati	11.895.000,00	3.538.036.719,00	938.329.484,00	4.476.366.203,00
4.01 . 4.01.10	Kecamatan Batu Ampar	8.470.000,00	2.661.949.190,00	885.356.550,00	3.547.305.740,00
4.01 . 4.01.11	Kecamatan Panyipatan	5.000.250,00	2.211.820.333,00	947.975.122,00	3.159.795.455,00
4.01 . 4.01.12	Kecamatan Takisung	9.435.500,00	2.643.072.204,00	922.570.070,00	3.565.642.274,00
4.01 . 4.01.13	Kecamatan Jorong	8.000.000,00	2.612.328.636,00	1.730.827.731,00	4.343.156.367,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.14	Kecamatan Kintap	7.000.000,00	2.372.386.227,00	879.801.300,00	3.252.187.527,00
4.01 . 4.01.15	Kecamatan Bajuin	3.000.000,00	2.081.272.908,00	894.274.172,00	2.975.547.080,00
4.01 . 4.01.16	Kecamatan Bumi Makmur	3.450.000,00	2.319.073.734,00	1.213.926.056,00	3.532.999.790,00
4.02	Pengawasan	0,00	7.180.129.916,00	4.392.305.099,00	11.572.435.015,00
4.02 . 4.02.01	Inspektorat Kabupaten	0,00	7.180.129.916,00	4.392.305.099,00	11.572.435.015,00
4.03	Perencanaan	0,00	6.480.584.134,00	7.688.474.830,00	14.169.058.964,00
4.03 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	368.826.600,00	368.826.600,00
4.03 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	285.206.200,00	285.206.200,00
4.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	92.999.400,00	92.999.400,00
4.03 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	129.683.300,00	129.683.300,00
4.03 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.03 . 1.06.01	Dinas Sosial	0,00	0,00	55.745.000,00	55.745.000,00
4.03 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	0,00	20.998.660,00	20.998.660,00
4.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	20.713.400,00	20.713.400,00
4.03 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	17.225.900,00	17.225.900,00
4.03 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00
4.03 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	9.999.400,00	9.999.400,00
4.03 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	22.375.000,00	22.375.000,00
4.03 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	40.541.200,00	40.541.200,00
4.03 . 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	0,00	0,00	20.988.800,00	20.988.800,00
4.03 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	13.999.400,00	13.999.400,00
4.03 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	33.080.500,00	33.080.500,00
4.03 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
4.03 . 3.02.01	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.03 . 3.03.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	20.998.400,00	20.998.400,00
4.03 . 3.03.02	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00
4.03 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	78.162.300,00	78.162.300,00
4.03 . 4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	132.155.500,00	132.155.500,00
4.03 . 4.01.05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	41.753.720,00	41.753.720,00
4.03 . 4.01.06	Kecamatan Pelaihari	0,00	0,00	29.371.400,00	29.371.400,00
4.03 . 4.01.07	Kecamatan Tambang Ulang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.03 . 4.01.08	Kecamatan Kurau	0,00	0,00	9.984.920,00	9.984.920,00
4.03 . 4.01.09	Kecamatan Bati-Bati	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
4.03 . 4.01.10	Kecamatan Batu Ampar	0,00	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00
4.03 . 4.01.11	Kecamatan Panyipatan	0,00	0,00	7.999.800,00	7.999.800,00
4.03 . 4.01.12	Kecamatan Takisung	0,00	0,00	7.025.650,00	7.025.650,00
4.03 . 4.01.13	Kecamatan Jorong	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.03 . 4.01.14	Kecamatan Kintap	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.03 . 4.01.15	Kecamatan Bajuin	0,00	0,00	6.655.560,00	6.655.560,00
4.03 . 4.01.16	Kecamatan Bumi Makmur	0,00	0,00	4.999.600,00	4.999.600,00
4.03 . 4.02.01	Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	6.480.584.134,00	5.925.043.320,00	12.405.627.454,00
4.03 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	72.488.200,00	72.488.200,00
4.03 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	29.999.100,00	29.999.100,00
4.03 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	39.724.600,00	39.724.600,00
4.04	Keuangan	1.425.448.368.000,00	305.656.757.086,00	13.499.709.292,00	319.156.466.378,00
4.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.535.120.780,00	1.535.120.780,00
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.392.778.368.000,00	299.541.726.863,00	7.245.401.469,00	306.787.128.332,00
4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	32.670.000.000,00	6.115.030.223,00	4.719.187.043,00	10.834.217.266,00
4.05	Kepegawaian	0,00	7.749.904.600,00	8.457.656.745,00	16.207.561.345,00
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	7.749.904.600,00	8.457.656.745,00	16.207.561.345,00
JUMLAH		1.504.840.826.282,00	1.012.667.017.080,00	910.192.914.815,43	1.922.859.931.895,43
SURPLUS / (DEFISIT)		(418.019.105.613,43)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	428.019.105.613,43	10.000.000.000,00	418.019.105.613,43	
4.04	Keuangan	428.019.105.613,43	10.000.000.000,00	418.019.105.613,43	
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	428.019.105.613,43	10.000.000.000,00	418.019.105.613,43	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00
<div>Pelaihari, 27 Desember 2019</div> <div>BUPATI TANAH LAUT</div> <div>SUKAMTA</div>					
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI					
Halaman 15					

<div><div><div><div>TANAH LAUT</div><div></div></div><div>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</div><div>RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div></div>						
KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
1.01.01		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	142.350.000,00	374.714.677.479,00	119.267.568.328,00	493.982.245.807,00
	1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	142.350.000,00	374.714.677.479,00	117.734.709.228,00	492.449.386.707,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	1.164.032.500,00	1.164.032.500,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	368.826.600,00	368.826.600,00
1.02.01		Dinas Kesehatan	72.325.280.082,00	91.386.029.352,00	278.176.449.754,64	369.562.479.106,64
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	72.325.280.082,00	91.386.029.352,00	276.643.673.554,64	368.029.702.906,64
	2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	0,00	0,00	1.247.570.000,00	1.247.570.000,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	285.206.200,00	285.206.200,00
1.03.01		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	388.250.000,00	11.561.455.319,00	209.653.050.878,99	221.214.506.197,99
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	388.250.000,00	11.561.455.319,00	209.321.616.878,99	220.883.072.197,99
	2.04	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	0,00	0,00	238.434.600,00	238.434.600,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	92.999.400,00	92.999.400,00
1.04.01		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	125.000.000,00	10.589.358.723,00	41.482.255.079,00	52.071.613.802,00
	1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	125.000.000,00	10.589.358.723,00	13.527.253.919,00	24.116.612.642,00
	2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	0,00	0,00	27.825.317.860,00	27.825.317.860,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	129.683.300,00	129.683.300,00
1.05.01		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	6.258.657.020,00	8.779.397.675,00	15.038.054.695,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	6.258.657.020,00	8.771.897.675,00	15.030.554.695,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.06.01		Dinas Sosial	0,00	4.611.405.935,00	5.667.549.532,00	10.278.955.467,00
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	4.611.405.935,00	5.611.804.532,00	10.223.210.467,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	55.745.000,00	55.745.000,00
1.06.02		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.875.026.658,00	2.692.258.306,60	4.567.284.964,60
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	842.009.410,00	842.009.410,00
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	1.875.026.658,00	1.850.248.896,60	3.725.275.554,60

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
2.01.01		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	7.473.247.080,00	7.281.457.932,00	14.754.705.012,00
	2.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	0,00	7.473.247.080,00	5.224.063.072,00	12.697.310.152,00
	3.07	Urusan Pilihan Perindustrian	0,00	0,00	2.036.396.200,00	2.036.396.200,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	20.998.660,00	20.998.660,00
2.03.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	138.000.000,00	4.768.851.702,00	4.016.420.482,00	8.785.272.184,00
	2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	138.000.000,00	4.768.851.702,00	1.880.659.412,00	6.649.511.114,00
	3.01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	2.115.047.670,00	2.115.047.670,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	20.713.400,00	20.713.400,00
2.06.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	3.938.203.108,00	3.956.138.397,00	7.894.341.505,00
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	3.938.203.108,00	3.938.912.497,00	7.877.115.605,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	17.225.900,00	17.225.900,00
2.07.01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	5.666.451.347,00	8.862.441.478,00	14.528.892.825,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	1.048.800.000,00	1.048.800.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	5.666.451.347,00	7.770.641.478,00	13.437.092.825,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00
2.08.01		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	4.061.197.186,00	8.480.209.616,00	12.541.406.802,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	136.102.220,00	136.102.220,00
	2.08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.061.197.186,00	8.334.107.996,00	12.395.305.182,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	9.999.400,00	9.999.400,00
2.09.01		Dinas Perhubungan	926.200.200,00	5.104.988.617,00	6.577.133.910,00	11.682.122.527,00
	2.09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	926.200.200,00	5.104.988.617,00	6.554.758.910,00	11.659.747.527,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	22.375.000,00	22.375.000,00
2.10.01		Dinas Komunikasi dan Informatika	491.200.000,00	3.507.904.606,00	6.923.952.553,00	10.431.857.159,00
	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	491.200.000,00	3.507.904.606,00	6.883.411.353,00	10.391.315.959,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	40.541.200,00	40.541.200,00
2.11.01		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	1.300.128.000,00	4.799.470.921,00	7.358.342.980,00	12.157.813.901,00
	2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.300.128.000,00	4.799.470.921,00	4.091.973.292,00	8.891.444.213,00
	3.06	Urusan Pilihan Perdagangan	0,00	0,00	3.245.380.888,00	3.245.380.888,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	20.988.800,00	20.988.800,00
2.12.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.880.770.000,00	4.652.256.902,00	2.216.385.150,00	6.868.642.052,00
	2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	1.880.770.000,00	4.652.256.902,00	2.202.385.750,00	6.854.642.652,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	13.999.400,00	13.999.400,00

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
2.13.01		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	428.740.000,00	3.236.422.727,00	9.280.132.370,00	12.516.555.097,00
	2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	428.740.000,00	3.236.422.727,00	9.247.051.870,00	12.483.474.597,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	33.080.500,00	33.080.500,00
2.17.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.629.543.216,00	1.846.258.339,00	5.475.801.555,00
	2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	0,00	3.629.543.216,00	1.623.990.118,00	5.253.533.334,00
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	0,00	0,00	217.468.221,00	217.468.221,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
3.02.01		Dinas Pariwisata	718.800.000,00	4.182.865.179,00	8.360.323.772,00	12.543.188.951,00
	3.02	Urusan Pilihan Pariwisata	718.800.000,00	4.182.865.179,00	8.340.323.772,00	12.523.188.951,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.03.01		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	36.490.813.948,00	18.102.552.754,00	54.593.366.702,00
	2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	0,00	0,00	2.107.376.560,00	2.107.376.560,00
	3.03	Urusan Pilihan Pertanian	0,00	36.490.813.948,00	15.974.177.794,00	52.464.991.742,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	20.998.400,00	20.998.400,00
3.03.02		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	300.000.000,00	6.226.544.226,00	5.867.882.339,20	12.094.426.565,20
	3.03	Urusan Pilihan Pertanian	300.000.000,00	6.226.544.226,00	5.855.132.339,20	12.081.676.565,20
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00
4.01.01		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	22.677.695.120,00	0,00	22.677.695.120,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	22.677.695.120,00	0,00	22.677.695.120,00
4.01.02		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	686.822.176,00	0,00	686.822.176,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	686.822.176,00	0,00	686.822.176,00
4.01.03		Sekretariat Daerah	138.256.000,00	18.429.199.011,00	55.846.254.582,00	74.275.453.593,00
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	22.661.024.850,00	22.661.024.850,00
	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	2.603.640.000,00	2.603.640.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	138.256.000,00	18.429.199.011,00	28.968.306.652,00	47.397.505.663,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	78.162.300,00	78.162.300,00
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	1.535.120.780,00	1.535.120.780,00
4.01.04		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	4.518.041.990,00	36.569.299.118,00	41.087.341.108,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	4.518.041.990,00	36.437.143.618,00	40.955.185.608,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	132.155.500,00	132.155.500,00
4.01.05		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.391.074.820,00	3.215.792.300,00	7.606.867.120,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	733.446.900,00	733.446.900,00

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
4.01.06	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	4.391.074.820,00	2.440.591.680,00	6.831.666.500,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	41.753.720,00	41.753.720,00
		Kecamatan Pelaihari	19.233.250,00	9.411.672.574,00	7.623.570.179,00	17.035.242.753,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	60.954.800,00	60.954.800,00
4.01.07	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	19.233.250,00	9.411.672.574,00	7.533.243.979,00	16.944.916.553,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	29.371.400,00	29.371.400,00
		Kecamatan Tambang Ulang	9.000.000,00	3.016.563.647,00	1.300.080.000,00	4.316.643.647,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00
4.01.08	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	9.000.000,00	3.016.563.647,00	1.217.080.000,00	4.233.643.647,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		Kecamatan Kurau	5.000.000,00	3.293.260.804,00	945.028.561,00	4.238.289.365,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	37.994.300,00	37.994.300,00
4.01.09	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	5.000.000,00	3.293.260.804,00	897.049.341,00	4.190.310.145,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	9.984.920,00	9.984.920,00
		Kecamatan Bati-Bati	11.895.000,00	3.538.036.719,00	1.031.259.284,00	4.569.296.003,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	17.999.800,00	17.999.800,00
4.01.10	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	67.430.000,00	67.430.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	11.895.000,00	3.538.036.719,00	938.329.484,00	4.476.366.203,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
		Kecamatan Batu Ampar	8.470.000,00	2.661.949.190,00	940.011.550,00	3.601.960.740,00
4.01.11	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	47.975.000,00	47.975.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	8.470.000,00	2.661.949.190,00	885.356.550,00	3.547.305.740,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00
		Kecamatan Panyipatan	5.000.250,00	2.211.820.333,00	1.020.778.322,00	3.232.598.655,00
4.01.12	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	64.803.400,00	64.803.400,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	5.000.250,00	2.211.820.333,00	947.975.122,00	3.159.795.455,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	7.999.800,00	7.999.800,00
		Kecamatan Takisung	9.435.500,00	2.643.072.204,00	1.000.105.890,00	3.643.178.094,00
4.01.13	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	70.510.170,00	70.510.170,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	9.435.500,00	2.643.072.204,00	922.570.070,00	3.565.642.274,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	7.025.650,00	7.025.650,00
		Kecamatan Jorong	8.000.000,00	2.612.328.636,00	1.810.827.731,00	4.423.156.367,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
4.01.14	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	8.000.000,00	2.612.328.636,00	1.730.827.731,00	4.343.156.367,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Kecamatan Kintap		7.000.000,00	2.372.386.227,00	922.301.100,00	3.294.687.327,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	14.999.800,00	14.999.800,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.01.15	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	7.000.000,00	2.372.386.227,00	879.801.300,00	3.252.187.527,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
	Kecamatan Bajuin		3.000.000,00	2.081.272.908,00	939.713.732,00	3.020.986.640,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	38.784.000,00	38.784.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	3.000.000,00	2.081.272.908,00	894.274.172,00	2.975.547.080,00
4.01.16	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	6.655.560,00	6.655.560,00
	Kecamatan Bumi Makmur		3.450.000,00	2.319.073.734,00	1.272.925.264,00	3.591.998.998,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	53.999.608,00	53.999.608,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	3.450.000,00	2.319.073.734,00	1.213.926.056,00	3.532.999.790,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	4.999.600,00	4.999.600,00
4.02.01	Inspektorat Kabupaten		0,00	7.180.129.916,00	4.417.305.099,00	11.597.435.015,00
	4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	0,00	7.180.129.916,00	4.392.305.099,00	11.572.435.015,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0,00	6.480.584.134,00	5.925.043.320,00	12.405.627.454,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	6.480.584.134,00	5.925.043.320,00	12.405.627.454,00
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1.392.778.368.000,00	299.541.726.863,00	7.317.889.669,00	306.859.616.532,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	72.488.200,00	72.488.200,00
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	1.392.778.368.000,00	299.541.726.863,00	7.245.401.469,00	306.787.128.332,00
4.04.02	Badan Pendapatan Daerah		32.670.000.000,00	6.115.030.223,00	4.749.186.143,00	10.864.216.366,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	29.999.100,00	29.999.100,00
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	32.670.000.000,00	6.115.030.223,00	4.719.187.043,00	10.834.217.266,00
4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,00	7.749.904.600,00	8.497.381.345,00	16.247.285.945,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	39.724.600,00	39.724.600,00
	4.05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	0,00	7.749.904.600,00	8.457.656.745,00	16.207.561.345,00
JUMLAH			1.504.840.826.282,00	1.012.667.017.080,00	910.192.914.815,43	1.922.859.931.895,43
SURPLUS / (DEFISIT)			(418.019.105.613,43)			
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Halaman 20						

